

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan suatu bangsa, bahkan hal itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu tatanan kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri. Setiap masyarakat dapat melakukan usaha dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Sukmasari, 2020). Namun dengan melihat permasalahan saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Rendahnya penghasilan merupakan faktor utama penyebab kemiskinan, karena dengan penghasilan yang rendah akan sangat berdampak pada kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Selain itu hal-hal yang paling sering digunakan dalam indikator kesejahteraan adalah populasi, tempat tinggal, kesehatan dan konsumsi (Domri et al., 2019; Sukmasari, 2020).

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang berdaya. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan memiliki *power* dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat (Hikmat, 2013). Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan. Maksudnya yaitu sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan serta sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005, hlm. 60).

Andika Pratama, 2021

BINA LEMBAGA, BINA USAHA, DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN USAHA (STUDI PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN BEBAS SAMPAH KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menjadi berdaya, atau proses dalam memperoleh kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Makna dari “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan serta langkah-langkah yang dilakukan dengan sistematis yang mencerminkan tahapan-tahap upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah dari berbagai perspektif baik ekonomi, *attitude*, maupun *skill*. Kemudian kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk menjadi berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya, kekuatan, ataupun kemampuan. Sedangkan “pemberian” mengindikasikan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan maupun kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen pemberdayaan (Devi & Pradoto, 2017).

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan merupakan suatu pendekatan *bottom up* atau *top down* yang dalam prakteknya masyarakat didudukkan sebagai aktor utama yang harus memiliki keswadayaan serta kemandirian (Herdiansyah, 2019). Pemberdayaan masyarakat sangatlah diperlukan sebagai upaya menjadikan masyarakat memiliki keberdayaan dalam berbagai aspek terutama dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi (Kartasasmita, 2016; Suharto, 2005). Sampai sekarang ini banyak sekali program pemberdayaan baik yang bersifat *top-down approach* maupun *bottom-up approach* yang dibuat maupun lahir untuk membantu masyarakat dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Namun tidak banyak program pemberdayaan yang berkelanjutan sampai menjadikan masyarakat mandiri karena sebagian besar program pemberdayaan yang dilaksanakan bersifat insidental atau sementara.

Andika Pratama, 2021

BINA LEMBAGA, BINA USAHA, DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN USAHA (STUDI PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN BEBAS SAMPAH KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Lebih lanjut dijelaskan oleh Mardikanto (2017, hlm.113) bahwa lingkup pelaksanaan pemberdayaan terbagi menjadi 4 hal yaitu , bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan yang saling berkaitan dalam menentukan kesejahteraan masyarakat.Selain itu disisi lain masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan masih dalam tahap ketergantungan (*dependence*) sehingga masih sangat bergantung kepada komunitas/pemberi program pemberdayaan (Amalia & Syawie, 2015). Program pemberdayaan yang baik seharusnya memiliki keberlanjutan jangka panjang bahkan menjadikan masyarakat itu mandiri sehingga mampu mengelola program pemberdayaan itu tanpa adanya campur tangan dari agen pemberdayaan. (Bahri,2019, hlm.06) menjelaskan setidaknya ada 3 input dalam pemberdayaan berkelanjutan yaitu, sumberdaya inividu, sumberdaya kelompok, dan sumberdaya kelembagaan dan terdiri dari empat aktivitas yaitu perubahan sikap (*Attitude*), peningkatan pengetahuan (*knowledge*), penguatan keterampilan (*skill*), dan dukungan sumberdaya (*resource*).

Dengan adanya pemberdayaan maka diharapkan akan dapat mendorong produktivitas bagi masyarakat itu sendiri, produktif dalam menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi perekonomian maupun produktif dalam hal menciptakan kreativitas. Produktivitas berasal dari kata “produktif” yang berarti mengandung sesuatu potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapat dikatakan suatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek. Produktivitas tak lain adalah indeks untuk mengukur seberapa jauh keluaran relatif dapat di capai dengan mendayagunakan masukan yang dapat dikombinasikan. Kemudian penjelasan lebih lanjut tentang produktivitas dikemukakan oleh Adam and Ebert yang menyatakan bahwa *productivity can be expressed on a total faktor basis or on partial faktor basis* (Ihsan, 2018, hlm 157). Filosofi produktifitas sebenarnya dapat mengandung arti keinginan dan usaha dari setiap manusia (individu atau kelompok) untuk selalu meningkatkan mutu kehidupannya dan penghidupannya. Masyarakat yang merasa puas secara alamiah akan berusaha meningkatkan hasil kerja mereka (*output*). Meningkatkan *output* kerja merupakan istilah lain dari apa yang disebut sebagai

Andika Pratama, 2021

BINA LEMBAGA, BINA USAHA, DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN USAHA (STUDI PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN BEBAS SAMPAH KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

produktivitas kerja. Dengan demikian produktivitas menyangkut hasil akhir, yakni seberapa besar hasil akhir yang diperoleh didalam proses produksi. Selain itu produktivitas juga diartikan menyangkut hasil akhir, yakni seberapa besar hasil akhir yang diperoleh didalam proses produksi, dalam hal ini adalah efisiensi dan efektivitas (Rosidah, 2003).

Produktivitas yang dimaksud disini adalah mampu secara produktif memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemamkuran dalam berkehidupan. Produktivitas juga tidak dapat dipisahkan dari kemandirian masyarakat itu sendiri karena selain produktivias pelaksanaan pemberdayaan diharapkan mampu menciptakan kemandirian usaha (Kholili et al., 2016; Sunengsih, 2019). Kemandirian (*self-reliance*) merupakan kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, paham dalam mengelola waktu, berfikir secara mandiri disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah. Kemandirian berkenaan dengan tugas dan keterampilan bagaimana mengerjakan, mengelola, dan mencapai sesuatu secara mandiri (Parker et al., 2018,hlm.226). Dengan masyarakat yang mandiri dan produktif dihaapkan masyarakat tersebut memiliki kualitas hidup yang baik.

Dari berbagai program-program pemberdayaan diberbagai bidang salah satu program yang cukup gencar dilaksanakan yaitu program pemberdayaan dalam hal kebersihan lingkungan karena permasalahan terkait sampah masih menjadi problematika yang sangat sulit untuk diatasi saat ini (Puspitawati & Rahdriawan, 2012). Pertambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke perkotaan sebagai dampak dari modernisasi telah menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari, pembuangan limbah sebagaimana yang terlihat sehari-hari limbah kemasan plastik, kaleng, kertas berserakan atau teronggok di jalan-jalan, di lorong-lorong, dan saluran drainase sehingga merupakan tantangan yang cukup sulit diatasi (Bekin et al., 2004; Serge Kubanza, 2020). Sampah merupakan masalah yang sangat serius baik di negara maju maupun negara berkembang dan sangat berkaitan dengan dampak

Andika Pratama, 2021

BINA LEMBAGA, BINA USAHA, DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN USAHA (STUDI PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN BEBAS SAMPAH KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan terutama di pemukiman miskin (Boulet et al., 2019).

Pertambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke perkotaan sebagai dampak dari modernisasi telah menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari, pembuangan limbah sebagaimana yang terlihat sehari-hari limbah kemasan plastik, kaleng, kertas berserakan atau teronggok di jalan-jalan, di lorong-lorong, dan saluran drainase. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat (Bachtiar et al., 2014). Permasalahan ini juga diakibatkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha penunjang pertumbuhan ekonomi sehingga memberi kontribusi yang besar terhadap peningkatan kualitas ataupun kuantitas sampah yang dihasilkan (Syafri, 2013). Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Sampah merupakan hal yang masih cukup sulit ditangani oleh negara Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari atau 625 juta liter dari jumlah total penduduk. Menurut berita yang dilansir oleh CNBC Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8-12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan, bahkan Indonesia penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia.

Andika Pratama, 2021

BINA LEMBAGA, BINA USAHA, DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN USAHA (STUDI PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN BEBAS SAMPAH KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Problematika terkait sampah menjadi suatu permasalahan klasik yang susah untuk ditangani terutama di lingkungan masyarakat miskin dan tergantung. Kurangnya kesadaran dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan memperburuk masalah di masyarakat pemukiman miskin/kumuh (Owusu, 2010; Serge Kubanza, 2020). Sebagian besar sanitasi dan pengelolaan limbah di pemukiman miskin masih kurang sehingga diperlukan sistem pengelolaan limbah yang efektif, dan terintegrasi (Kerry Turner & Powell, 1991). Hal tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan pengembangan kebijakan, strategi, dan rencana pengelolaan limbah terpadu, dan memberikan dukungan melalui kerangka kerja legislatif dan kelembagaan yang tepat (Morrison & Munro, 1999). Untuk mewujudkan hal itu diperlukan pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya pemberdayaan memberikan kekuatan pada orang lain (Novek, 1999). Bentuk pemberdayaan ini dapat dicapai dengan mengorganisir/memobilisasi orang untuk bertindak (Pigg, 2002). Dalam konteks mendukung pemberdayaan, individu dapat belajar satu sama dengan yang lainnya dalam suasana proses saling belajar, karena pendidikan yang populer seharusnya mempromosikan pemberdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran individu, mengidentifikasi, serta dapat menyelesaikan masalah (Cox, 2014; Wiggins et al., 2009).

Bandung merupakan salah satu kota besar yang masih memiliki permasalahan terkait sampah, banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di sungai ataupun ditempat umum seperti jalan raya sehingga sangat mengganggu, dampaknya pun sangat besar, selain dapat menyebabkan banjir, bau yang tak sedap, lingkungan yang tak sehat dan tentunya membahayakan kesehatan bagi masyarakat (Ramadhan, 2016; Ruhmawati, 2017; Surakusumah, 2008). Situs resmi Mongabay mengatakan bahwa hasil perhitungan berdasarkan data yang dihimpun Mongabay Indonesia, menunjukkan produksi sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung mencapai 3.950 ton/hari. Sementara yang bisa diangkut, hanya 2.750 ton/hari.

Andika Pratama, 2021

BINA LEMBAGA, BINA USAHA, DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN USAHA (STUDI PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN BEBAS SAMPAH KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pengelolaan sampah di masa mendatang perlu lebih diarahkan pada perubahan cara pandang dan perilaku masyarakat dan lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya (*bottom-up*) sebab terbukti pendekatan yang bersifat *top down approach* tidak berjalan secara efektif mengingat permasalahan tersebut maka diperlukan lembaga-lembaga yang dapat membangun kemandirian usaha dalam mengelola sampah (Widiarti, 2012). Salah satu lembaga yang dapat membantu membangun kemandirian usaha dalam pengelolaan limbah sampah adalah lembaga bank sampah. Dengan permasalahan sampah di Kota Bandung itu maka semakin banyak melahirkan gerakan-gerakan masyarakat yang ingin menjadikan kota Bandung lebih bersih. Salah satunya yaitu menjadikan lingkungan tempat tinggal sebagai kawasan bebas sampah.

Dengan kondisi seperti itu, terdapat suatu daerah di Kota Bandung yang dulunya terkenal dengan kawasan kumuh akan sampah. Tidak adanya pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sehingga sampah menumpuk dan seringkali masyarakat membuang sampah ke sungai, Kawasan itu adalah Kampung Cibunut RW 07 Kelurahan Kebon Pisang. Hal ini menyebabkan kawasan RW 07 Kelurahan Kebon Pisang sering menjadi langganan banjir. Pemerintah serta beberapa kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang peduli dengan lingkungan mulai melakukan beberapa gerakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam rangka melestarikan lingkungan yang bersih, nyaman dan berharap agar masyarakat mulai mencintai dan sadar akan kebersihan lingkungan. Gerakan atau kegiatan yang diupayakan dalam melestarikan lingkungan tersebut dapat dikatakan juga sebagai proses pemberdayaan masyarakat (Sulastri, 2019:05).

Karena melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. sebagai tolak ukur keberhasilan. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih dan asri tidak terjadi. Program pemberdayaan yang diciptakan untuk mengatasi dan melestarikan lingkungan adalah melalui program KBS (Kawasan Bebas Sampah). Program KBS ini di usung oleh seorang dari organisasi Gerakan Semangat Selalu Ikhlas (GSSI) dan melakukan pendampingan terhadap

Andika Pratama, 2021

BINA LEMBAGA, BINA USAHA, DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN USAHA (STUDI PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN BEBAS SAMPAH KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat RW 07 Kelurahan Kebon Pisang. Awal mula RW 07 Kelurahan Kebong Pisang merupakan daerah kumuh dan sarang penyakit akibat sampah menumpuk, namun setelah hadirnya program kawasan bebas sampah di RW 07 Kelurahan Kebon pisang sekarang menjadi bersih dan asri, dan berwarna. Berwarna di sini setiap RT di cat dengan warna yang berbeda-beda di tambah konsep mural yang berbeda pula serta biopori di depan rumah-rumah warga, sehingga membuat lingkungan tersebut menjadi lebih indah (Sulastri, 2019,hlm.06).

Program pemberdayaan terkait sangatlah banyak sekali diadakan baik yang lahir dari masyarakat maupun dari pemerintah dengan berbagai bidang termasuk halnya pemberdayaan dibidang pengelolaan sampah. Bahkan kota Bandung sendiri menggalangkan program KANG PISMAN dan kawasan bebas sampah Cibunut ini merupakan pendukung dari program KANG PISMAN yang mulai digulirkan oleh Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2015 untuk mengajak masyarakat bijak dalam mengelola sampah. Namun dari sekian banyak program pemberdayaan yang dilakukan hanya sedikit yang bersifat berkelanjutan sehingga banyak program pemberdayaan yang akhirnya tidak berjalan lagi karena masyarakatnya masih tergantung (*dependence*) terhadap agen/pemberi program.

Dalam hal mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat melalui pelaksanaan pemberdayaan ini diperlukan perencanaan, proses dan pelaksanaan yang sangat terstruktur sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Pemberdayaan yang dilakukan di kawasan bebas sampah ini tentunya sangat menarik untuk dianalisis lebih mendalam dikarenakan pemberdayaan di kampung Cibunut dapat terlaksana secara berkelanjutan. Selain itu mengingat masih cukup banyak program pemberdayaan yang bersifat insidental maka pemberdayaan di kawasan bebas sampah ini dapat dijadikan rujukan dalam hal melaksanakan program pemberdayaan.

Beberapa penelitian seperti (Adamson & Bromiley, 2013; Amalia & Syawie, 2015; B. Suswanto, R. Windiasih, A. I. Sulaiman, 2019; Herdiansyah,

Andika Pratama, 2021

BINA LEMBAGA, BINA USAHA, DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN USAHA (STUDI PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN BEBAS SAMPAH KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2019; Nikkiah & Redzuan, 2010; Rifa'i, 2013; Twyman et al., 2001) telah meneliti terkait dengan berbagai pelaksanaan pemberdayaan dalam suatu program, namun belum banyak peneliti yang membahas terkait bagaimana suatu pembinaan dalam pemberdayaan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian terdahulu seperti halnya penelitian Sulastri (2019) yang berjudul implementasi program kawasan bebas sampah (KBS) dalam meningkatkan perilaku arif lingkungan menekankan pada penanganan permasalahan sampah. Kemudian pada penelitian Sekarningrum (2018) yang berjudul gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mewujudkan kawasan bebas sampah menekankan pada penggerakkan tim PKK dalam mengelola sampah. Lebih lanjut pada penelitian Adamson & Bromiley (2013) yang berjudul *Community empowerment: Learning from practice in community regeneration* menekankan pada pemberdayaan masyarakat yang praktiknya dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat turut andil dalam pelaksanaan program. Dengan berbagai penelitian terdahulu yang telah dikemukakan maka hal ini menarik untuk diteliti karena pelaksanaan pemberdayaan di Indonesia masih cukup banyak yang hanya bersifat insidental dan tidak terlaksana secara berkelanjutan. Kemudian berdasarkan referensi yang dikumpulkan maka peneliti menentukan bina usaha, bina lingkungan, bina kelembagaan, kemandirian usaha dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel-variabel dalam penelitian ini.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah sehingga penelitian tersebut dapat lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam menguraikan pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup pelaksanaan pemberdayaan di kawasan bebas sampah.

Andika Pratama, 2021

BINA LEMBAGA, BINA USAHA, DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN USAHA (STUDI PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN BEBAS SAMPAH KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Penelitian ini terbatas pada variabel-variabel yang peneliti pilih dalam melaksanakan penelitian.
3. Informasi yang disajikan yaitu yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dilokasi yang telah peneliti tentukan.

Setelah melakukan pembatasan masalah maka berdasarkan berbagai permasalahan yang telah dijabarkan di latar belakang sebelumnya maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran data mengenai pengaruh bina usaha, bina lingkungan, dan bina lembaga terhadap produktivitas dan kemandirian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara bina usaha, bina lingkungan, dan bina lembaga terhadap produktivitas dan kemandirian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Apa sajakah variabel maupun faktor-faktor dari bina usaha, bina lingkungan, dan bina lembaga yang paling dominan dalam mempengaruhi produktivitas dan kemandirian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di RW 07 Kampung Cibunut Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis yang meliputi bina usaha, bina lingkungan, dan bina lembaga terhadap produktivitas dan kemandirian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh antar bina usaha, bina lingkungan, dan bina lembaga terhadap produktivitas dan kemandirian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menjelaskan hasil analisis mengenai faktor-faktor dari bina usaha, bina lingkungan, dan bina lembaga yang paling dominan dalam mempengaruhi produktivitas dan kemandirian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di RW 07 Kampung Cibunut Kota Bandung.

Andika Pratama, 2021

BINA LEMBAGA, BINA USAHA, DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN USAHA (STUDI PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN BEBAS SAMPAH KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teori

1. Memperkuat dan menganalisis bagian-bagian pelaksanaan pemberdayaan yang terdiri dari aspek bina usaha, bina lingkungan, dan bina lembaga.
2. Memberikan stimulus untuk menentukan konsep atau teori yang tepat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi praktisi pemberdayaan dan pengembangan SDM: Kajian ini dapat dijadikan rujukan untuk melihat pengaruh suatu program pemberdayaan masyarakat khususnya yang mencakup bina usaha, bina lingkungan dan bina lembaga terhadap kemandirian dan produktivitas usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi peneliti: Kajian ini dapat dijadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya untuk memperkuat dan melengkapi hasil penelitian ini.

1.4.3 Aspek Isu dan Aksi Sosial

1. Bagi pembuat kebijakan dan tenaga operator: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam membuat kebijakan/keputusan terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Agar mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian. Dalam hal ini membagi pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis

BAB II Kajian Pustaka merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian maupun konsep teori yang melandasi permasalahan dalam penelitian yaitu terdiri dari konsep dan karakteristik masyarakat, teori pemberdayaan

Andika Pratama, 2021

BINA LEMBAGA, BINA USAHA, DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINATIF TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN USAHA (STUDI PADA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KAWASAN BEBAS SAMPAH KELURAHAN KEBON PISANG KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat, produktivitas usaha, kemandirian usaha serta kesejahteraan bagi masyarakat.

BAB III Metode Penelitian merupakan bagian yang bersifat prosedural yang meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV Temuan dan Pembahasan merupakan pemaparan hasil temuan dan kondisi empirik yang didapat oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Pada pemaparan pembahasan, peneliti akan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab I.

BAB V Simpulan dan Rekomendasi

merupakan simpulan hasil temuan dan pembahasan yang akan di dengan kajian pustaka yang relevan sehingga adanya kesinambungan antara kajian empirik dengan kajian teori. Selain itu juga peneliti memaparkan rekomendasi atau saran baik kepada lembaga terkait maupun peneliti selanjutnya terhadap hasil penelitian